

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Brotodihardjo, R.Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal actual hukum perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Darwin. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Detlev F. Vagts dalam Manahan MP sitompul. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan*, Malang: Setara Press
- Djafar, Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dengan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Makasar: Raja Grafindo Persada.
- Ginting, Elyta Ras. 2017. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Hidayah, Khoirul. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Pajak Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang Jatim: Setara Press Kelompok Intrans Publishing
- Huizink, MR. J. B. 2004. *Insoventie*, alih bahasa Linus Dolujawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Kansil, C.S.T. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*, ctk kelima, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Lewis D. Solomon, et, al, dalam Manahan MP sitompul. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan*, Malang: Setara Press
- Maria D Badruzaman dalam Manahan MP Sitompul. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan, di dalam dan di luar proses Pengadilan*, Malang: Setara Press
- Mertokusumo, Sudikno dalam H.Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Prasetya, Rudhi. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media Jakarta
- Sitompul, Manahan MP. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar proses Pengadilan*, Malang: Setara Press
- Subhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Soemitro, Rochmat Dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung: PT Refika Aditama
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung: PT. Eresco.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ketiga belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*, edisi 2, Jakarta: PT. Sofmedia

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Jakarta: Sekretariat Negara
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Jurnal / Kamus / Artikel / Skripsi

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap

Fernandez. (2012). Tinjauan Yuridis Hak Mendahulu Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan. Skripsi Universitas Indonesia.

Irwan Aribowo, <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19557-kreditur-preferen-dalam-pajak>, -apakah-sama-dalam-versi-kepailitan.

Kurniawan. (2012) *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2.

Panjaitan, Hulman (2018) *Pajak dan Aspek Hukum Perdata*. Tô-râ: Volume 4 Nomor 3, Jurnal Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Siburian, Ruth Yohana. Susilowati, Ety. dan Ispriyarso, Budi. (2017). *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan*. Diponegoro Law Journal, 6 (1), 2-6.

Teguh, Rahmad. (2016). *Kewajiban Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Pajak yang Belum Dibayar (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 406/K/Pdt.Sus-Pailit/2015)*. Skripsi Universitas Narotama Surabaya.

